BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada OPD Kabupaten Kuningan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan OPD Kabupaten Kuningan, maka semakin meningkat pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penerapan anggaran yang berorientasi pada output dan outcome mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memperjelas pencapaian target kinerja organisasi.
2. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian akuntansi yang baik mampu mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pengendalian akuntansi yang memadai, kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalisir sehingga kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkat.
3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hal ini menunjukkan bahwa sasaran anggaran yang disusun secara jelas, spesifik, terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil akhir dapat memudahkan aparatur pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kejelasan sasaran anggaran juga membantu proses evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja menjadi lebih optimal.

4. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan aparatur pemerintah dalam proses penyusunan anggaran, maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian target kinerja organisasi. Partisipasi yang baik dalam proses penganggaran mampu meningkatkan komunikasi, koordinasi, serta komitmen organisasi dalam mencapai tujuan instansi pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada OPD Kabupaten Kuningan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sehingga OPD Kabupaten Kuningan disarankan untuk terus meningkatkan implementasi anggaran berbasis kinerja melalui penyusunan indikator kinerja yang jelas, sinkronisasi antara program dan target kinerja, serta penguatan sistem evaluasi capaian program secara berkala. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi aparatur dalam memahami konsep penganggaran berbasis *output* dan *outcome* agar pelaksanaan anggaran tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar berorientasi pada hasil pembangunan daerah.

   Saran tersebut sejalan dengan konsep penerapan anggaran berbasis kinerja yang dibahas dalam Bab II, dimana keberhasilan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh keterpaduan antara perencanaan strategis, penetapan indikator kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Optimalisasi komponen-komponen tersebut akan memperkuat kemampuan instansi pemerintah dalam menunjukkan ketercapaian tujuan organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sehingga OPD Kabupaten Kuningan disarankan untuk memperkuat sistem pengendalian akuntansi melalui peningkatan pengawasan internal, pemisahan fungsi yang jelas, dokumentasi transaksi yang tertib, serta pelaksanaan audit internal secara berkala. Penguatan pengendalian akuntansi ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah menjadi lebih baik.

   Saran ini sejalan dengan konsep pengendalian akuntansi dalam Bab II yang menekankan pentingnya prosedur pengendalian sebagai sarana untuk menjaga keandalan informasi keuangan dan efektivitas pengelolaan sumber daya organisasi. Penerapan unsur-unsur pengendalian seperti pemisahan fungsi, prosedur pemberian wewenang, dokumentasi yang memadai, serta pemeriksaan intern secara konsisten akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh poitif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sehingga OPD Kabupaten Kuningan disarankan untuk menyusun sasaran anggaran yang lebih spesifik, terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil akhir. Selain itu, diperlukan komunikasi yang lebih efektif antara pimpinan dan aparatur pelaksana agar setiap sasaran anggaran dapat dipahami dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga proses evaluasi serta pertanggungjawaban kinerja dapat berjalan lebih optimal.

   Saran tersebut sejalan dengan konsep kejelasan sasaran anggaran yang dibahas dalam Bab II, yang menekankan bahwa sasaran yang dirumuskan secara jelas akan memudahkan proses pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja. Kejelasan sasaran juga akan membantu setiap perangkat daerah dalam mengarahkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif

sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Oleh karena itu, pimpinan OPD Kabupaten Kuningan disarankan untuk meningkatkan keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran dengan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menyampaikan usulan, masukan, dan pertimbangan pada setiap tahapan penganggaran. Keterlibatan yang lebih aktif diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab, serta komitmen pegawai dalam mencapai target kinerja organisasi.

   Saran ini selaras dengan konsep partisipasi penyusunan anggaran dalam Bab II yang menempatkan keterlibatan aparatur sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran. Semakin tinggi tingkat partisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran, maka semakin besar pula peluang terciptanya kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan program yang dijalankan, sehingga mampu mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah jumlah responden, memperluas objek penelitian, serta menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seperti kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi, kualitas sistem pelaporan, gaya kepemimpinan, dan sistem pengawasan internal. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya dilakukan pada OPD Kabupaten Kuningan, tetapi juga dapat dilakukan pada pemerintah daerah lain baik tingkat kabupaten maupun kota agar hasil penelitian dapat dibandingkan dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di sektor pemerintahan daerah.